



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 219 TAHUN 2022

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu melaksanakan perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023

No	Judul Ranpergub	Pemerakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
1	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah atas Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta			√		a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 68 ayat (1); b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Pasal 11; c. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah perlu diubah;	Triwulan II
2	Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta		√			a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah b. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga telah habis masa berlakunya	Triwulan I
3	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta		√			Bahwa salah satu rekomendasi KPK RI dan rekomendasi atas temuan dari BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang	Triwulan I
4	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta				√	Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sudah tidak relevan dan tidak perlu diatur lagi dalam Peraturan Gubernur.	Triwulan II
5	Penyelenggaraan Reforma Agraria untuk Perumahan dan Permukiman	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	√				Belum ada aturan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan program Reforma Agraria di wilayah perkotaan (non-pertanian) sedangkan mandat pelaksanaan Reforma Agraria termasuk pada wilayah perkotaan	Triwulan IV
6	Kewajiban Pembangunan dalam Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	√				Menindaklanjuti Pasal 220 Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTRWP DKI Jakarta.	Triwulan III
7	Insentif dan Disinsentif dalam Perwujudan Rencana Tata Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	√				Perlunya pengaturan mendetail dan operasional terkait mekanisme penerapan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang yang merupakan tindak lanjut dari Pergub 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta	Triwulan III
8	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta		√			Pasca diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya mengubah sistematika pelayanan perizinan dan adanya kewajiban pengintegrasian ke sistem layanan yang dibangun secara nasional, maka perlu dilakukan peninjauan atas Pergub No. 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang	Triwulan II
9	Ketentuan Tata Bangunan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta		√			Sehubungan dengan tingginya dinamika pembangunan dan perlu dilakukannya sinkronisasi prosedur penyelenggaraan bangunan gedung serta bangunan prasarana, maka perlu dilakukan peninjauan atas Pergub No. 135 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Bangunan untuk menindaklanjuti Pasal 115 Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTRWP DKI Jakarta.	Triwulan I
10	Penyelenggaraan Kawasan Kompak dan Kawasan Berorientasi Transit	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	√				Menindaklanjuti Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan, maka perlu dilakukan revisi Pergub No. 147 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Panduan Rancang Kota, Pergub 67 Tahun 2019 dan Pergub 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		Penyampaian
11	Pedoman Standardisasi Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	√				Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu diganti; pasca diterbitkannya PP No. 16 Tahun 2021 sehingga Pergub yang mengatur mengenai Standar Bangunan Negara perlu direvisi untuk menyesuaikan aturan tersebut	Triwulan III
12	Pengembalian Pemenuhan Intensitas Bangunan (Revisi Pergub 41 Tahun 2017 tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Lahan Pengganti)	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta		√			Bahwa berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi intensitas pemanfaatan ruang. Sedangkan berdasarkan Pasal 147 PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan bahwa setiap pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam KKPR. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan KKPR maka dikenakan tindakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, diantaranya adalah denda administratif berupa pengembalian pemenuhan intensitas	Triwulan I
13	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta		√			Bahwa dengan berlakunya PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan ketentuan Peraturan Gubernur No. 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu dilakukan penyesuaian	Triwulan III
14	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Hijau	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta				√	Bahwa dengan berlakunya PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Permenpupr No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau, maka Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Hijau sudah tidak relevan dan tidak perlu diatur lagi dalam Peraturan Gubernur	Triwulan I
15	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta			√		Menindaklanjuti Raperda tentang Jaringan Utilitas	Triwulan II
16	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta			√		Menindaklanjuti Raperda tentang Jaringan Utilitas	Triwulan II
17	Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas (Penggantian Atas Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas)	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta		√			Menindaklanjuti Raperda tentang Jaringan Utilitas	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
18	Pemenuhan Kewajiban Kontribusi Tambahan Melalui Penyediaan Trotoar, Ducting, dan Kelengkapannya	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	√				Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Triwulan III
19	Petunjuk Pelaksanaan Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Jakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√				Amanat Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di DKI Jakarta	Triwulan IV
20	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			√		1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Catatan: 1. UU ITNo.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah". 2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E BSSN. Cipta Kerja dan Peraturan Turunannya 2. Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan perizinan dan non-perizinan secara elektronik dilindungi DPMPSTP. 3. Sudah kurang relevan dengan perubahan regulasi dan sistem / aplikasi yang diimplementasikan	Triwulan IV
21	Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			√		1. Perlu penyesuaian nomenklatur terkait tugas, fungsi, administrasi dan operasional Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame yang terdiri dari beberapa Perangkat Daerah serta penyesuaian aturan dan ketentuan dalam mekanisme pemrosesan penyelenggaraan reklame; dan 2. Tindaklanjut Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda. Provinsi DKI Jakarta Nomor e-210/TM.12.13 tanggal 17 November 2022 hal Laporan Hasil Rapat Lanjutan Pembahasan Usulan Revisi Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame	Triwulan IV
22	SPM BLUD PUSYAWANKESSWANAK	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian		√			Mengganti SPM sesuai rencana kerja/kegiatan PUSYAWANKESSWANAK	Triwulan II
23	Tarif BLUD PUSYAWANKESSWANAK	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian		√			Mengikuti harga pasaran dan standar hidup	Triwulan I
24	Penyaluran Pangan Berlebih	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	√				Menindaklanjuti disposisi Gubernur atas Nota Dinas Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 955/-072.1 tanggal 1 September 2021 Perihal telaahan atas surat Foodbank of Indonesia	Triwulan I
25	Tata Cara Pemenuhan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Kepegawaian Daerah	√				Pemenuhan rencana aksi pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi/Monitoring Center for Prevention (MCP) di Badan Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	Triwulan I
26	Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian Daerah		√			Materi muatan sudah tidak relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Triwulan I
27	Pedoman Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah		√			Materi muatan sudah tidak relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menyesuaikan kebutuhan organisasi untuk mencabut Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
28	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perantaraan Kerja	Badan Kepegawaian Daerah			√		Perubahan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai	Triwulan II
29	Tata Cara Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian	Badan Kepegawaian Daerah			√		<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian Nomenklatur Penyesuaian materi muatan dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil 	Triwulan II
30	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2023	Badan Kepegawaian Daerah	√				Menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Triwulan II
31	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Badan Kepegawaian Daerah			√		Penyesuaian dengan perkembangan kebijakan KPK	Triwulan III
32	Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah	√				<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan mengenai Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pendelegasian kewenangan bagi Suku Badan Kepegawaian Wilayah dalam menolak/memberikan izin perkawinan atau perceraian 	Triwulan III
33	Pemutakhiran Data Mandiri	Badan Kepegawaian Daerah		√			<ul style="list-style-type: none"> Menyesuaikan kebutuhan organisasi Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian 	Triwulan III
34	Tambahan Penghasilan Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah		√			Perubahan keseluruhan substansi dan kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai	Triwulan IV
35	Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian Daerah		√			<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian dengan hasil kajian roadmap kode etik dan kode perilaku dari Tenaga Ahli Universitas Indonesia Penyesuaian dengan nilai BerAKHLAK Simplifikasi Peraturan Gubernur tentang Kode Etik dan Kode Perilaku dengan Budaya Kerja dalam satu produk hukum 	Triwulan IV
36	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Kepegawaian Daerah				√	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai status Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil selain PPPK Amanat Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 	Triwulan IV
37	Perlindungan dan Pelayanan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian Daerah	√				Pemenuhan rencana aksi pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi/Monitoring Center for Prevention (MCP) di Badan Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	Triwulan IV
38	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√				Melanjutkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 mengenai Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2022 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemerakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		Penyampaian
39	Desain Besar Pengembangan Pengelolaan Data Terpadu dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat di Provinsi DKI Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√				<p>Penyusunan Desain Besar Pengembangan Pengelolaan Data Terpadu dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat di Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada sejumlah poin sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSD 42 Tahun 2021 Pengentasan Kemiskinan Melalui Integrasi Bantuan Sosial "Merekomendasikan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan Data Carik sebagai basis data terpadu untuk intervensi program dan merekomendasikan penyusunan Grand Design Data Terpadu sebagai payung hukum" 2. TLHP BPK "Bappeda Bersama OPD Terkait supaya merumuskan bentuk mitigasi risiko keakuratan basis data dengan mengintegrasikan seluruh basis data kependudukan menjadi satu data besar (big data) kemiskinan yang terpadu dan dapat digunakan Bersama dalam proses pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah" 3. RPD 2023-2025 Tujuan ke-2: "Perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan" Tujuan Ke-4: "transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas melalui akselerasi transformasi digital, pengembangan manajemen kota cerdas" 4. Prinsip Satu Data Indonesia Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 	Triwulan I
40	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√			<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan landasan untuk penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 	Triwulan II
41	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√				<p>Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 sekaligus tindak lanjut dari Rekomendasi BPK atas Hasil Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021.</p>	Triwulan I
42	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√				<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p>	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		Penyampaian
43	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Triwulan III
44	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Triwulan II
45	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Triwulan III
46	Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Tahun 2023 - 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√				1. Amanat Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelembagaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas untuk membuat Rencana Aksi Daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur. 2. Telah dilakukan pembahasan dan finalisasi di Biro Hukum untuk disampaikan kepada Kemendagri. Dikarenakan keterbatasan waktu, Ranpergub tetap diusulkan dalam Propempergub mengantisipasi Fasilitasi Kemendagri tidak dilakukan pada akhir Tahun 2022 (Ranpergub carryover).	Triwulan I
47	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Kegiatan Filantropi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√			Mengganti Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Dunia Usaha dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi saat ini dalam kaitannya dengan penyelenggaraan TSLDU/CSR di Provinsi DKI Jakarta.	Triwulan III
48	Revisi Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			√		Bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perubahan susunan keanggotaan dan penyesuaian tugas Simpul Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur sehingga perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		Penyampaian
49	Pedoman Perencanaan Pengembangan Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	√				bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan kompetensi yang dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan kompetensi terintegrasi (corporate university) perlu acuan dalam melaksanakan perencanaan pengembangan kompetensi yang terintegrasi	Triwulan I
50	Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi		√			1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan	Triwulan III
51	Persyaratan dan Tata Cara Pelaporan Lowongan Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	√				Peraturan Daerah 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan	Triwulan I
52	Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi			√		1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan	Triwulan I
53	Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Ketenagalistrikan.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi				√	1. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. dan PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. 4. Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Triwulan I
54	Pedoman Pengangkatan Anak	Dinas Sosial	√				Merevisi Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengangkatan Anak dan mengatur mengenai Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) serta mengatur kembali materi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengangkatan Anak materi muatan mengenai bimbingan, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan pengangkatan anak (Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018).	Triwulan I
55	Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	√				Pelaksanaan lebih lanjut (amanat) Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.	Triwulan II
56	Dewan Disabilitas Jakarta	Dinas Sosial	√				Pelaksanaan lebih lanjut (amanat) Pasal 128 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	Triwulan III
57	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	√				Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		Penyampaian
58	Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	√				Pelaksanaan lebih lanjut (amanat) Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial	Triwulan I
59	Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa			√		Guna memenuhi bukti dukung tingkat kematangan UKPBJ level 3 (proaktif) dan Rencana Aksi KPK program MCP (<i>Monitoring Centre for Prevention</i>) melalui penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ	Triwulan IV
60	Kebijakan Penetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2023	Badan Pendapatan Daerah	√				Berdasarkan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019	Triwulan I
61	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2023	Badan Pendapatan Daerah	√				Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023	Triwulan I
62	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame	Badan Pendapatan Daerah			√		Penyesuaian Ketentuan Sanksi Administrasi berupa kenaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan Pajak Daerah dan upaya mendorong pertumbuhan penyelenggaraan reklame serta untuk optimalisasi penerimaan Pajak Reklame	Triwulan I
63	Pengenaan 0% (Nol Persen) Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Perolehan Hak Pertama Kali Dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Sampai Dengan Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)	Badan Pendapatan Daerah		√			1. Penegasan pemberian pengenaan 0% (nol persen) atas pemberian hak baru yang berasal dari program pemerintah di bidang pertanahan berupa kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta penyempurnaan persyaratan guna percepatan pelayanan. 2. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2017 tentang Pengenaan 0% (Nol Persen) atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Triwulan I
64	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Pajak Air Tanah	Badan Pendapatan Daerah			√		1. Penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah. 2. Sebagai upaya optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta.	Triwulan III
65	Tata Cara Pemecahan Rumah Susun dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Satuan Rumah Susun	Badan Pendapatan Daerah		√			1. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan PBB-P2 atas rumah susun diatur dengan Peraturan Gubernur 2. Mengatur tata cara pemecahan dan perhitungan PBB-P2 atas rumah susun. 3. Memberikan rasa keadilan dan kemudahan bagi wajib pajak atas pemenuhan persyaratan administrasi perpajakan daerah 4. Optimalisasi pemungutan PBB-P2 atas rumah susun"	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		Penyampaian
66	Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah Melalui Sistem Informasi Geospasial	Badan Pendapatan Daerah	√				Dalam rangka pembentukan dan pemeliharaan basis data dapat terselenggara dengan tertib dan terpadu sehingga terjamin kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai pembentukan dan pemeliharaan basis data pajak daerah melalui sistem informasi geospasial	Triwulan I
67	Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah	Badan Pendapatan Daerah			√		Mengubah beberapa pasal pada Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah	Triwulan I
68	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Nomor Identitas Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah			√		Mengubah beberapa pasal pada Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Nomor Identitas Pajak Daerah	Triwulan II
69	Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek yang Berfungsi Sebagai Ruang Terbuka Hijau	Badan Pendapatan Daerah	√				Memberikan insentif berupa keringanan kepada objek pajak berupa ruang terbuka hijau yang mendukung penyerapan air tanah dan penghijauan kota	Triwulan III
70	Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Di Dalam Kota	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan II
71	Pencabutan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah				√	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang SOTK PD Pembangunan Sarana Jaya	Triwulan I
72	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Terkait Untuk Penyediaan Dan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Perpanjangan penugasan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang berakhir pada tahun 2022	Triwulan I
73	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Dalam Pengelolaan Alat Produksi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Perpanjangan masa penugasan melebihi tahun 2022	Triwulan I
74	Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air minum dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah				√	Berakhirnya masa kerjasama PAM JAYA dengan Mitra Swasta	Triwulan I
75	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Diperlukan perubahan pasal terkait pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana PT MRT Jakarta (Perseroda)	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemerakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyempadan
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
76	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Tindak lanjut Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2021	Triwulan III
77	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Guna menambah substansi tentang jangka waktu pengelolaan dan penambahan pasal tentang pemanfaatan aset	Triwulan III
78	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya	Triwulan IV
79	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 273 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah				√	Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya	Triwulan IV
80	Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif dalam Rangka Pembinaan BUMD	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	√				Tindak lanjut Pasal 3 Ayat (5) dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan IV
81	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Diperlukan beberapa perubahan terkait: a. Perubahan jangka waktu pengelolaan SJUT b. Penugasan kepada anak usaha dan kerjasama dengan badan usaha lain dalam penyelenggaraan SJUT c. Penambahan substansi tentang SPM d. Penambahan substansi tentang retribusi/pemanfaatan BMD	Triwulan IV
82	Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 76 tahun 2019 tentang Pedoman Penugasan Kepada BUMD	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan IV
83	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Rapat koordinasi antara BP BUMD dan Kementerian Dalam Negeri tanggal 4 Agustus 2022	Triwulan IV
84	Revisi Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2019 tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			√		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan IV
85	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Sepeda Sewa (Pemberian Insentif untuk Layanan Sepeda Sewa)	Dinas Perhubungan	√				1. Tindak lanjut Pergub Nomor 36 Tahun 2022 tentang sepeda sewa	Triwulan II
86	Perubahan Atas Peraturan Gubernur 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta	Dinas Perhubungan			√		1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK. 2. Ranpergub yang masih berproses di tahun 2022	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
87	Standar Pelayanan Minimal Terminal Penumpang	Dinas Perhubungan	√				1. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; 2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar pelayanan Minimum Terminal. 4. Ranpergub yang masih berproses di tahun 2022, dan tambahan usulan klausul yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Terminal BLUD pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan pengunjung di terminal yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.	Triwulan III
88	Tarif Angkutan Umum Massal (Satu Moda)	Dinas Perhubungan		√			1. Dialihkan dari semula usulan Pergub Tentang Pencabutan Pergub Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tarif Integrasi Angkutan Penumpang Umum dalam Sistem Bus Rapid Transit menjadi satu pergub yang mengatur tarif angkutan umum massal.	Triwulan III
89	Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) di Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perhubungan			√		1. Amanat Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan 2. Pelaksanaan Perda 5/2014 tentang Transportasi pasal 53 3. Terdapat di dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, sehingga diharapkan berjalan secara in line dengan proses berjalannya Perda RITJ dan peraturan yang terkait dengan Kendaraan Listrik di OPD lain.	Triwulan III
90	Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	√				1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia)	Triwulan III
91	Rencana Induk Perkeretaapian Perkotaan (RIPP)	Dinas Perhubungan	√				1. Sebagai turunan dari Rencana Induk Transportasi Jakarta 2. Ranpergub yang masih berproses di tahun 2022	Triwulan IV
92	Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi DKI Jakarta	Biro Pemerintahan	√				Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Triwulan IV
93	Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√			Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah	Triwulan I
94	Pembinaan Organisasi Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Triwulan I
95	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan I
96	Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			√		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Pergub Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Belanja Daerah	Triwulan II
97	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemerakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
98	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan IV
99	Tata Cara Pengurusan Dan Penghapusan Piutang Daerah Selain Pajak Daerah Dan Pendapatan Transfer	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				√	Pencabutan Pergub 148 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dikarenakan adanya aturan baru terkait pengurusan piutang daerah yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara. 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137 /Pmk.06/2022 Tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara.	Triwulan II
100	Analisis Standar Belanja Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Triwulan IV
101	Analisis Standar Belanja Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Triwulan IV
102	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Amanat dalam pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Triwulan III
103	Pedoman Teknis Penilaian Usulan Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		√			Telah terbit Surat Edaran Penilaian BLUD yang terbaru dari Kemendagri yakni Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tentang Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah tanggal 6 Februari 2019 sehingga Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan PPK BLUD perlu di ganti.	Triwulan III
104	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		√			Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan I
105	Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Tindak Lanjut Permendagri 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Triwulan I
106	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			√		Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan I
107	Sistem Pembayaran Pendapatan Daerah secara Elektronik	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Saat ini dalam pelaksanaan pembayaran pendapatan daerah secara elektronik diatur melalui Peraturan sebagai berikut : 1. Pergub Nomor 204 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik 2. Pergub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Elektronik Sehubungan telah berlakunya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah oleh karena diperlukan penyesuaian terhadap 2 Peraturan Gubernur tersebut	Triwulan III
108	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemerakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		Penyampaian
109	Sistem dan Prosedur Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Permendagri No. 77 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan IV
110	Tata Cara Pengelolaan Kas Umum Daerah Pada Rekening Bank	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan I
111	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Sewa Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			√		Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Triwulan I
112	Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 61 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Triwulan I
113	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui sistem elektronik	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		√			Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Melalui Electronic Budgeting	Triwulan II
114	Standar Harga Satuan Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Triwulan IV
115	Standar Harga Satuan Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√				Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Triwulan IV
116	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta 2022-2026	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√				- Dokumen yang terakhir adalah Peraturan Gubernur No.143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 2014 -2019. - Draft masih dalam proses harmoni tahun 2022	Triwulan I
117	Pedoman Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√				Menjadi Pedoman dalam Pembentukan Rencana Kontijensi Multi Ancaman Bencana	Triwulan III
118	Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Provinsi DKI Jakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		√			Revisi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2016 Tentang Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana	Triwulan IV
119	Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√				Turunan Perka BNPB No 12 Tahun 2014 Tentang Peran serta Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Triwulan IV
120	Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				√	Sudah terbit Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Triwulan I
121	Penghargaan Prestasi Keolahragaan dan Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga		√			Perubahan Peraturan gubernur Nomor 215 Tahun 2016	Triwulan I
122	Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan Tahun 2023-2026	Dinas Pemuda dan Olahraga			√		Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
123	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Disabilitas	Dinas Pemuda dan Olahraga	√				Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	Triwulan II
124	Tata cara pelaksanaan pembangunan prasarana dan penyediaan sarana olahraga Aspirasi Masyarakat	Dinas Pemuda dan Olahraga	√				Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	Triwulan III
125	Desain Besar Olahraga DKI Jakarta	Dinas Pemuda dan Olahraga	√				Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional	Triwulan IV
126	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual		√				Triwulan I
127	Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit	Dinas Kesehatan			√		1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk Memberikan Informasi atas Adanya Dugaan Kekerasan terhadap Anak 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual	Triwulan III
128	Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	Dinas Kesehatan			√		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.	Triwulan III
129	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah	Dinas Kesehatan		√			Tersusunnya pedoman standar tarif pelayanan RSUD dan RSKD yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan dan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan IV
130	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Kelas D	Dinas Kesehatan		√			Tersusunnya pedoman standar tarif pelayanan RSUD dan RSKD yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan dan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan IV
131	Tarif Layanan Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan	√				Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (atribusi)	Triwulan II
132	Standar Pelayanan Minimal pada UPT Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan	√				Keputusan Gubernur Nomor 626 Tahun 2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah sebagai BLUD	Triwulan I
133	Penyelenggaraan Posyandu	Dinas Kesehatan				√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun Lembaga Adat Desa, Kelembagaan Posyandu yang bergeser menyebabkan tugas dan fungsi Posyandu serta Lintas Sektor juga perlu disesuaikan.	Triwulan I
134	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penataan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Kefarmasian	Dinas Kesehatan			√		Kewenangan daerah provinsi untuk menyesuaikan kebijakan terbaru sesuai pada Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.	Triwulan I
135	Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Jakarta Nomor 209 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat	Dinas Kesehatan			√		Karena adanya perubahan SOTK Dinas Kesehatan pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
136	Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	√				Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);	Triwulan II
137	Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin	Dinas Kesehatan			√		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;	Triwulan II
138	Tata Cara Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi Restoran/Rumah Makan/Jasaboga diubah menjadi Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Dinas Kesehatan			√		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;	Triwulan III
139	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Dinas Kesehatan			√		Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;	Triwulan III
140	Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan (PKT) dan Cabang Distribusi Alat Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta	Dinas Kesehatan	√				Perintah Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab XVIII.	Triwulan II
141	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	√				Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah	Triwulan II
142	Perubahan atas Peraturan Gubernur dan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah	Dinas Kesehatan	√				Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah	Triwulan II
143	Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat	Dinas Kesehatan	√				Amanah UU No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.	Triwulan II
144	Pengendalian Penyakit HIV AIDS	Dinas Kesehatan	√				Untuk mengakselerasi pengendalian HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta.	Triwulan II
145	Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		√			Bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2019 perlu diganti.	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		Penyampaian
146	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		√			Penggabungan 2 (dua) Peraturan Gubernur yaitu Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Kedua Peraturan Gubernur tersebut dicabut dan diterbitkan Peraturan Gubernur baru tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dengan penambahan materi muatan yang lebih holistik	Triwulan I
147	Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		√			Dalam rangka menyesuaikan nomenklatur tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dan perubahan tugas dari setiap Perangkat Daerah Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten dan Kota	Triwulan II
148	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		√			Dalam rangka menyesuaikan nomenklatur dan penambahan anggota pada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), disusun perubahan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provinsi DKI Jakarta.	Triwulan II
149	Alat Pemadam Api Ringan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	√				Amanat Perda 8 tahun 2008	Triwulan IV
150	Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		√			Amanat Perda 8 tahun 2008	Triwulan I
151	Pedoman Investigasi Kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		√			Amanat Perda 8 tahun 2008	Triwulan I
152	Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Secara Non Yustisial dan Yustisial	Satuan Polisi Pamong Praja	√				1. Pedoman tata laksana pemerintahan yang baik pada Satpol PP dalam penegakkan Perda maupun Perkada 2. Pola Kerja Satpol PP yang belum terukur terkait pelaksanaan operasi non yustisial dan yustisial	Triwulan II
153	Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja					1. Amanat dari Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagai dasar Pembentukan Satlinmas di DKI Jakarta 2. Tindaklanjut dari Surat Menetri Dalam Negeri yang menginstruksikan kepada Kepala Daerah untuk segera membentuk Satlinmas 3. Belum terdapat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pembentukan Satgas Linmas dan Satlinmas di DKI Jakarta	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyerapan
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
154	Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah		√			1. Penyesuaian terhadap PP 28/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Revisi Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 3. Saran/Masukan hasil fasilitasi Kemendagri untuk penyempurnaan	Triwulan I
155	Tata Cara Pelaksanaan Selain Sewa Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah		√			1. Penyesuaian terhadap PP 28/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Revisi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Triwulan IV
156	Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan, Tukar Menukar, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				1. Penyesuaian terhadap PP 28/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Triwulan IV
157	Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola JAMC	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Triwulan II
158	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola JAMC	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				1. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 2. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah untuk menyempurnakan persyaratan administrasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Manajemen Aset serta mendukung percepatan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.	Triwulan I
159	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola JAMC	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				1. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 2. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah untuk menyempurnakan persyaratan administrasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Manajemen Aset serta mendukung percepatan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.	Triwulan I
160	Fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola JAMC (Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Remunerasi, dan Kerja Sama)	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				1. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 2. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah untuk menyempurnakan persyaratan administrasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Manajemen Aset serta mendukung percepatan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.	Triwulan II
161	Pedoman Pemberian Insentif kepada Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				Implementasi Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Triwulan I
162	Pemberian Rekomendasi HGB di atas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Badan Pengelolaan Aset Daerah		√			1. Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015. 2. Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Pasal 52 ayat (2) huruf f Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk tupoksi Unit Pengelola Manajemen Aset.	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
163	Rencana Strategis, dan Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola JAMC	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah untuk menyempurnakan persyaratan administrasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Manajemen Aset serta mendukung percepatan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.	Triwulan II
164	Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola JAMC	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah untuk menyempurnakan persyaratan administrasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Manajemen Aset serta mendukung percepatan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.	Triwulan II
165	Mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Atas Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Gedung/Bangunan	Badan Pengelolaan Aset Daerah	√				Menindaklanjuti Temuan APIP pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 11/-1.922.3.Reg tanggal 26 Desember 2019 serta untuk menjamin tepat waktu pelaksanaan pekerjaan pembongkaran bangunan/gedung milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah terjual melalui pemindahtanganan secara lelang	Triwulan I
166	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas	Badan Pengelolaan Aset Daerah			√		Mengakomodir kebutuhan atas penyempurnaan regulasi pelaksanaan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya dalam penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.	Triwulan I
167	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru	Dinas Pendidikan			√		Delegasi Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB	Triwulan I
168	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah	Dinas Pendidikan			√		Delegasi Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah jenjang Dikdas dan Dikmen	Triwulan I
169	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2014 tentang Prasarana dan Sarana Pendidikan	Dinas Pendidikan		√			TLHP BPK, serta penyesuaian dengan telah terbitnya Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang OTK DKI Jakarta	Triwulan I
170	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	Dinas Pendidikan			√		Delegasi Pergub Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bansos	Triwulan II
171	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan			√		Penyelenggaraan Kewenangan Daerah, serta penyesuaian dengan telah terbitnya Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang OTK DKI Jakarta	Triwulan II
172	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan			√		Penyelenggaraan Kewenangan Daerah, serta penyesuaian dengan telah terbitnya Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang OTK DKI Jakarta	Triwulan II
173	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan			√		Penyelenggaraan Kewenangan Daerah	Triwulan II
174	Sekolah Berasrama di DKI Jakarta	Dinas Pendidikan	√				Penyelenggaraan Kewenangan Daerah	Triwulan III
175	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar	Dinas Pendidikan		√			Penyelenggaraan Kewenangan Daerah, serta penyesuaian dengan Pergub Nomor 19 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 64 Tahun 2020 tentang TPP	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyempitan
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
176	Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah (revisi dari Pergub 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		√			Perlu adanya Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang baru, karena Peraturan Gubernur yang lama (Pergub 18 Tahun 2018) terdampak terbutnya UU Cipta Kerja dan perlunya mengakomodir peran serta masyarakat dan manajemen krisis kepariwisataan yang diamanatkan oleh instruksi menteri narekrif	Triwulan II
177	Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		√			Revisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kondisi saat ini	Triwulan I
178	Tarif Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Dinas Kebudayaan	√				Penetapan PKJ TIM sebagai BLUD	Triwulan III
179	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Dinas Kebudayaan	√				Penetapan PKJ TIM sebagai BLUD	Triwulan III
180	Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi	Dinas Kebudayaan	√				Amanat Perda 4 tahun 2015	Triwulan IV
181	Kampung Budaya	Dinas Kebudayaan	√				1. Amanat UU No.29 tahun 2007 Pasal 26 ayat (6) 2. Amanat UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 3. Amanat Permendagri No.18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 10 ayat (2)	Triwulan II
182	Subsidi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Dinas Kebudayaan	√				Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322)	Triwulan I
183	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√				Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan diatur berdasarkan kewenangan melalui Pergub	Triwulan III
184	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				√	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diinisiasi oleh Badan Pendapat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan perubahan kedua, maka terhadap tarif retribusi pelayanan perumahan akan disesuaikan melalui Raperda tersebut	Triwulan II
185	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunan Rumah Susun Sederhana Sewa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			√		- Adanya ketentuan yang sudah tidak relevan dengan fakta di lapangan - Ranpergub ini telah disampaikan sejak awal Tahun 2022 namun belum terbit juga hingga akhir tahun 2022	Triwulan II
186	Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun dan Pengelolaan Rumah Susun Milik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		√			Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik telah diubah sebanyak 2x yaitu dengan Pergub 133/2019 dan Pergub 70/2021 sehingga menjadi kurang efektif dan efisien jika satu aturan ada 3 kali perubahan. Selain itu juga banyak ditemukan pasal-pasal yang kurang jelas dan bertentangan satu dengan yang lain	Triwulan III
187	Izin Usaha Pengelolaan Rumah Susun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	√				Setiap Pengelola Rumah Susun, sesuai amanat Pasal 85 PP 13/2021 tentang Rumah Susun wajib mendapatkan izin berusaha dari Gubernur, dan saat ini belum ada aturan Perizinan Berusaha dimaksud	Triwulan III
188	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			√		Ranpergub ini merupakan tindak lanjut dari hasil fasilitasi pembahasan Ranpergub tentang Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kampung Kota oleh Ditjen Otda pada 30 September 2022, untuk merekonstruksi Ranpergub dimaksud menjadi perubahan atas Pergub 90/2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Terpadu karena materi muatan yang diatur di dalamnya masih relevan. Ranpergub perubahan ini tetap berupaya memenuhi keberlanjutan pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman, dengan menyempurnakan tahapan pelaksanaan berdasarkan pengalaman penataan permukiman di DKI Jakarta lima tahun terakhir	Triwulan I
189	Bantuan Perbaikan Rumah Deret	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	√				Diperlukannya landasan peraturan guna memperbarui dan melengkapi Pergub 64 Tahun 2013 tentang Bantuan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh Melalui Penataan Kampung	Triwulan II
190	Remunerasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Unit Pengelola Dana Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	√				Permendagri 79/2018 & Pergub 165/2012	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemeraksa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
191	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			√		Perubahan atas Pergub 14/2020 tentang Perubahan atas Pergub 104/2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah terkait Pengalihan Unit dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penghunian serta Pemberian Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh penerima manfaat	Triwulan II
192	Mekanisme Pengalihan Unit Hunian Down Payment Nol Rupiah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	√				Ranpergub ini merupakan tindak lanjut dari hasil FGD tentang Penunjukkan/Pembentukan Lembaga Pemerintah Daerah dalam Pengalihan Unit Hunian DP Nol Rupiah Lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah yang diadakan pada tanggal 22 dan 29 September 2022, dimana direkomendasikan untuk mengganti jangka waktu pengalihan unit yang semua 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 16 Pergub 14/2020 menjadi 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, dibutuhkan juga peraturan terkait mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada penerima manfaat serta penerapan sanksi untuk memfasilitasi SK Kadis DPRKP Nomor 321 Tahun 2022 tentang SOP Pemantauan dan Evaluasi Penerima Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	Triwulan III
193	Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023-2030	Dinas Lingkungan Hidup	√				Menindaklanjuti Pasal 6 ayat (2) Perpres Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.	Triwulan II
194	Tarif Layanan Unit Pengelola Sampah Terpadu	Dinas Lingkungan Hidup	√				Ingub 49/2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 dimana tercantum target pembentukan BLUD bidang Persampahan yang menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan PPK BLUD, diperlukan standarisasi tarif layanan yang akan dilakukan oleh Unit Pengelola Sampah Terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur	Triwulan I
195	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup	√				- Dalam rangka menjawab hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Jakarta kinerja atas pengelolaan limbah B3 medis TA 2020 dan semester I TA 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan - Adanya kebutuhan pedoman bagi fasyankes di wilayah DKI Jakarta dimana belum adanya aturan daerah mengenai pengelolaan limbah medis yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan	Triwulan III
196	Rencana Induk Pengelolaan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	√				Telah tersusunnya kajian dokumen perencanaan (roadmap) pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari fasyankes, usaha skala kecil, dan rumah tangga di tahun 2022, dan diperlukan penetapan terkait dengan roadmap dimaksud agar dapat dipedomani oleh OPD, instansi dan stakeholder terkait	Triwulan III
197	Pengelolaan Pemakaman	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	√				Delegasi dari Perda 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman	Triwulan I
198	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			√		Sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi	Triwulan II
199	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		√			Penyesuaian dengan Permenkes Nomo 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	Triwulan III
200	Pembubaran RSU Adhyaksa	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi				√	Penyelesaian kesepakatan bersama antara Pemprov DKI dan Kejaksaan Agung yang rencananya akan berakhir di 31 Desember 2023	Triwulan IV
201	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Operasional Prosedur	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			√		1. Perubahan Nomenklatur PD/URPD Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 2. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		Penyampaian
202	Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	√				Perintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah	Triwulan IV
203	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah beserta perubahannya	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi				√	Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah	Triwulan IV
204	Pengelolaan Arsip Daerah dan Sarana Prasarana Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		√			Perintah Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kearsipan Daerah	Triwulan I
205	Pembakuan Sarana dan Prasarana Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				√	Perintah Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kearsipan Daerah	Triwulan I
206	Wajib Serah Arsip/Dokumen Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				√	Perintah Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kearsipan Daerah	Triwulan I
207	Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			√		Tindak lanjut Rekomendasi evaluasi pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta TA 2022 oleh BSSN	Triwulan II
208	Ekosistem Kota Cerdas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	√				Menyiapkan visi dan strategi kota cerdas	Triwulan IV
209	Aplikasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	√				Terbitnya pergub untuk memastikan JAKI sebagai one stop app Pemprov DKI Jakarta (Blueprint arsitektur SPBE)	Triwulan IV
210	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Revisi Pergub Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		√			· Penyesuaian dengan Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menjadi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. · Penyesuaian dengan Revisi Permendagri 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Triwulan III
211	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	Biro Hukum			√		Menyesuaikan SOP Fasilitasi di Kemendagri	Triwulan III
212	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak	Biro Hukum			√		Kewenangan Pemerintah Daerah	Triwulan III
213	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2017 tentang Tenaga Ahli Dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				√	Menindaklanjuti hasil Fasilitasi Kemendagri	Triwulan II

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP.197301211993031004